

ABSTRAK

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka mewujudkannya telah berkomitmen kuat dan memiliki keseriusan yang nyata dibuktikan dengan terus meningkatnya peringkat KLA yang diraih dan menjadi Lokasi Studi Tiru bagi daerah lainnya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk dapat meraih predikat yang paling utama yaitu Kabupaten Layak Anak. Melalui latar belakang tersebut, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini meliputi tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan dan program serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literature yang diperoleh melalui buku, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, serta wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan dari kebijakan dan program dalam mewujudkan KLA oleh Pemerintahan Kabupaten Sukabumi telah berjalan dengan sangat baik, dibuktikan dengan terus meningkatnya predikat yang diraih yang semula Pratama menjadi Nindya serta meningkatnya persentase dalam pemenuhan hak anak dari ke-5 klaster indikator yang terdiri atas 1) Hak Anak atas Sipil dan Kebebasan, 2) Hak Anak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternative, 3) Hak Anak atas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 4) Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta 5) Hak Anak atas Perlindungan Khusus. Walaupun dalam pelaksanaannya sudah baik, terdapat beberapa hambatan dalam mencapai tingkatan sebagai KLA yaitu belum terbentuknya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Kabupaten Layak Anak karena adanya keterbatasan dana anggaran. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan program dan inovasi yang telah dikeluarkan.

Kata Kunci: Anak, Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Sukabumi, Pemenuhan Hak Anak